



Civil Decision Enforcement System In Indonesia: Obstacles & Solutions

**Prospect of Economic Law
Reform to Prepare the Post-
Pandemic Economic Recovery:
Session 2”**

INLU 2022



Dr. Ridwan Mansyur, S.H, M.H.

- Registrar of the Supreme Court of Indonesia
- Head of the Technical Team of the Working Group For “Pedoman Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”

An aerial photograph of a city skyline, likely New York City, featuring numerous skyscrapers and a river. A large, white, semi-transparent zigzag graphic is overlaid on the image, creating a stylized, abstract background. The text is positioned on the left side of the image, within the white zigzag area.

**Sekilas Pengaturan
Eksekusi
di Indonesia**

Dasar Hukum

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Peradilan
Umum dan Undang-
Undang Peradilan Agama

Peraturan Perundang-
Undangan Lain yang
terkait



SEMA dan SK KMA

SK Dirjen Badilum

Para Pihak dalam Eksekusi

Ketua Pengadilan Negeri/Agama

Memimpin jalannya eksekusi .



Panitera atau Juru Sita

melaksanakan Eksekusi

Pemohon Eksekusi

pihak yang menang dan berhak mendapatkan pemenuhan hak .

Termohon Eksekusi

pihak yang kalah dan berkewajiban memberikan pemenuhan hak

Asas-Asas Eksekusi

01

Eksekusi atas Perintah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

- Atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- Jika objek eksekusi terletak di wilayah hukum Pengadilan tersebut maka melimpahkan Eksekusi secara delegasi kepada Pengadilan tempat Objek Eksekusi

02

Putusan yang bersifat kondemnatoir

- hanya putusan yang amar atau diktumnya mengandung penghukuman terhadap diri Tergugat

Asas-Asas Eksekusi

03

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

- Putusan Perdata yang BHT
- Hubungan antara para pihak telah pasti

04

Putusan tidak dijalankan secara sukarela

- Merupakan upaya paksa
- Berdasrakan permohonan
- biaya eksekusi ditanggung Tereksekusi

Pengecualian Asas Eksekusi



Terdapat
beberapa
Pengecualian
dalam
Eksekusi

Akta yang disamakan dengan Putusan BHT

- Grosse akta pengakuan utang
- Sertifikat Hak Tanggungan
- Sertifikat Jaminan Fidusia

Putusan Serta merta

- Berdasrakan permohonan
- Memenuhi persyaratan yang limitative
- Jaminian dari Penggugat
- Persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tinggi Agama

Putusan Provisional

Ketentuan hampr sama dengan Putusan serta merta

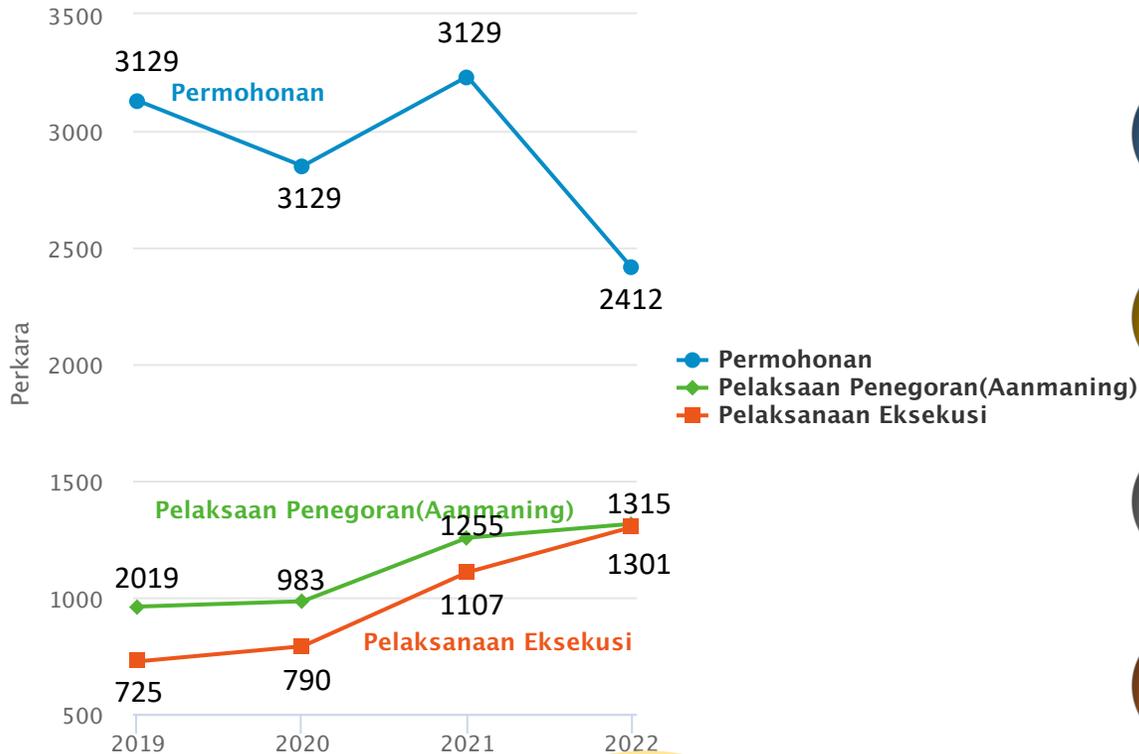
Jenis Eksekusi

Eksekusi Riil

- Menyerahkan Suatu Barang;
- Pengosongan Sebidang Tanah Atau Rumah;
- Membongkar Suatu Bangunan
- Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu
- Penghentian Suatu Perbuatan Atau Keadaan

Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Jumlah Permohonan, Aanmaning dan Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2019-2022



Highcharts.com

5 Jenis Eksekusi Terbanyak Tahun 2002



Perbuatan Melawan Hukum
Sejumlah 416.



Wanprestasi
Sejumlah 322



Perselisihan Pemutusan Hubungan
Sejumlah 259



Perbuatan Melawan Hukum
Sejumlah 149



Objek Sengketa Tanah
Sejumlah 100

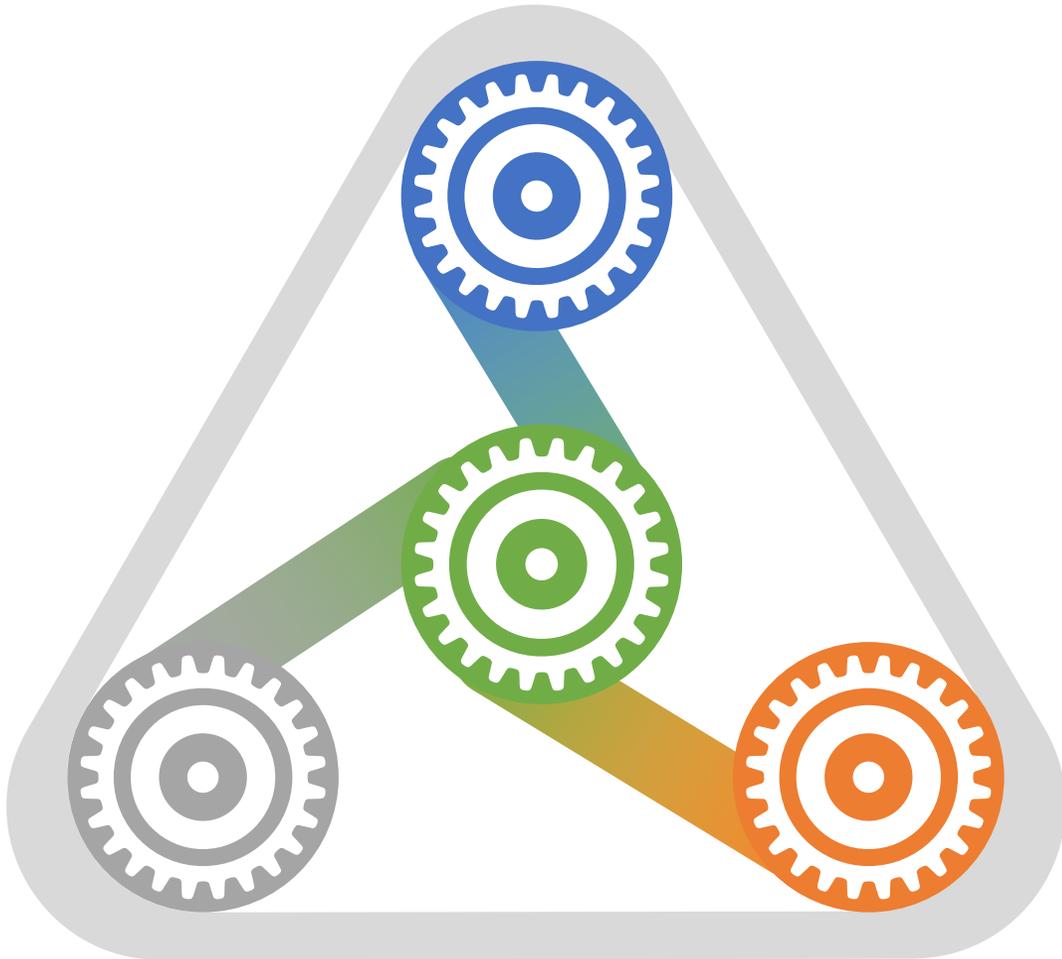
Permohonan Eksekusi Terbanyak



An aerial photograph of a city, likely New York City, showing a dense urban landscape with numerous skyscrapers and a river. Overlaid on the image is a large, white, zigzag graphic that resembles a mountain range or a stylized path. The graphic is semi-transparent, allowing the city buildings to be seen through it. The overall color palette is warm, with a golden-brown hue, suggesting a sunset or sunrise. The text 'Hambatan dan Solusi Eksekusi' is written in a bold, orange font on the left side of the image.

Hambatan dan Solusi Eksekusi

Permasalahan Eksekusi Perdata Indonesia



Permasalahan Yuridis

Permasalahan mengenai peraturan perundangan-perundangan terkait eksekusi

Permasalahan Eksternal

Permasalahan yang terjadi karena faktor instansi/lembaga lain baik kurangnya kerjasama atau ketentuan yang dikeluarkan instansi/lembaga lain

Permasalahan Internal

Permasalahan yang terjadi dalam lingkungan peradilan baik karena sistem maupun praktek peradilan

Permasalahan Yuridis

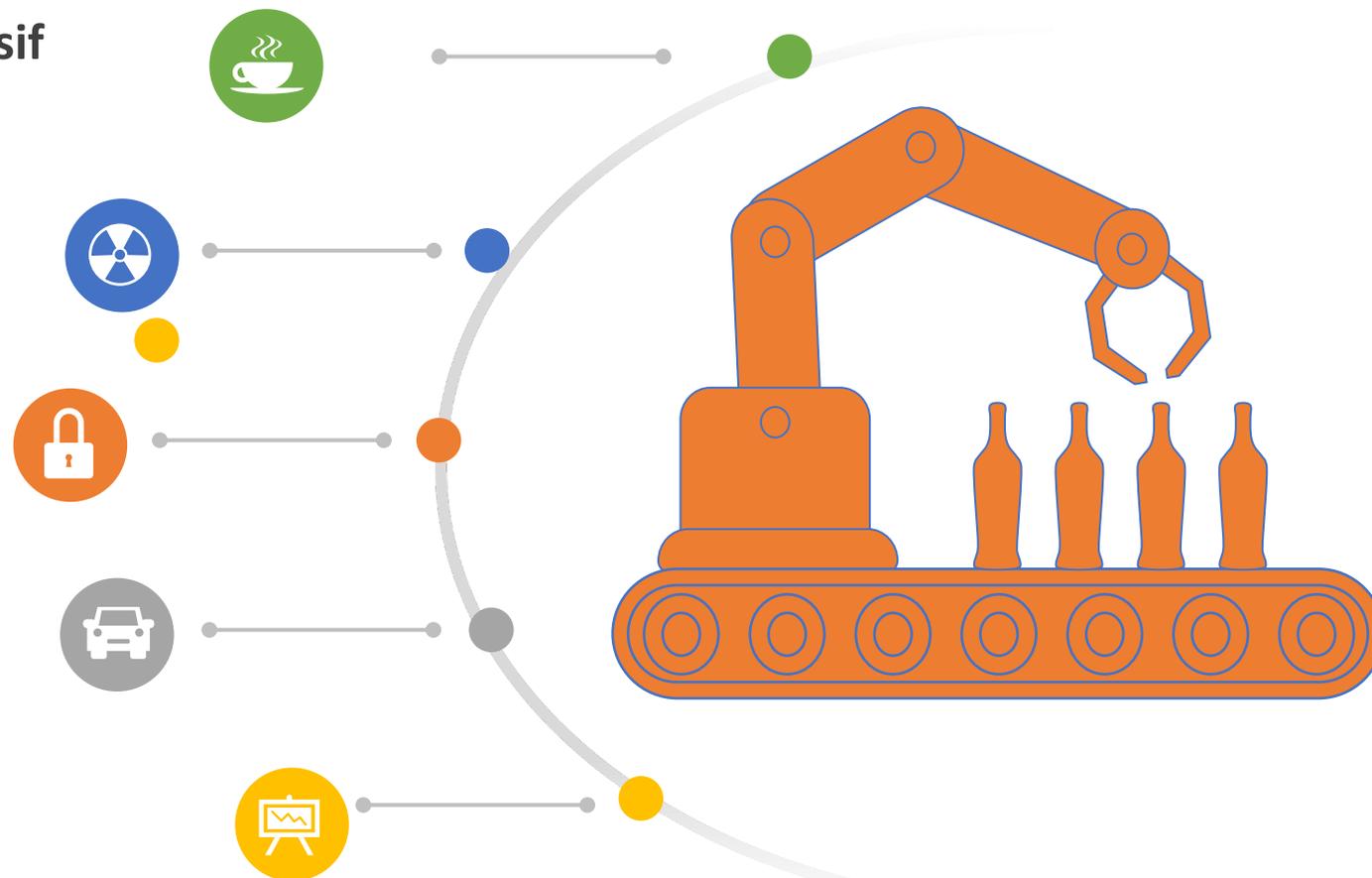
Belum adanya Pengaturan mengenai eksekusi perdata secara komprehensif baik

Peraturan Teknis yang dikeluarkan Lembaga Lain kadangkala menghambat eksekusi

Dibutuhkan peraturan yang mensupport jalannya eksekusi dengan Tertib

Putusan Non-executable

Berbagai Upaya Hukum



Permasalahan Internal

Kompetensi, Pengalaman dan Keberanian Ketua Pengadilan



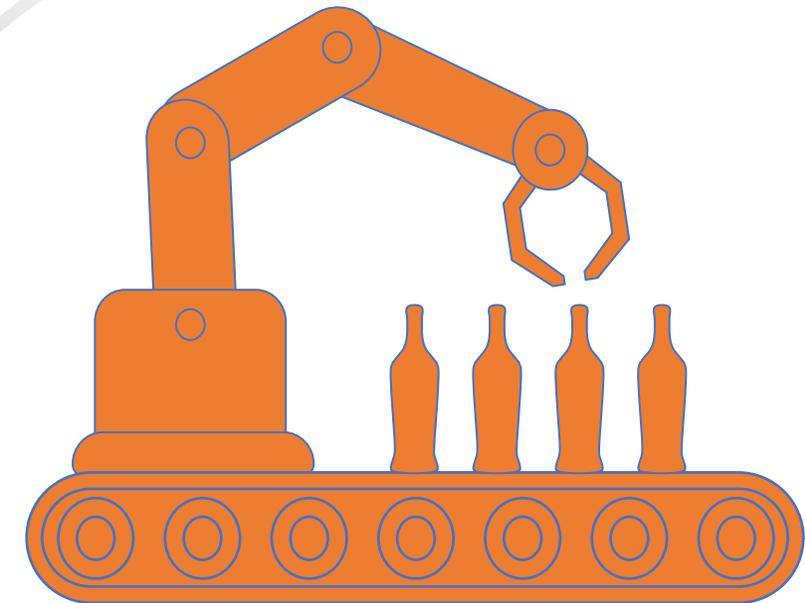
Lemahnya Kompetensi Juru Sita



Rendahnya Kuantitas Juru Sita



Belum tersedia unit kerja pada MA yang bertugas untuk kebijakan dan Evaluasi Eksekusi



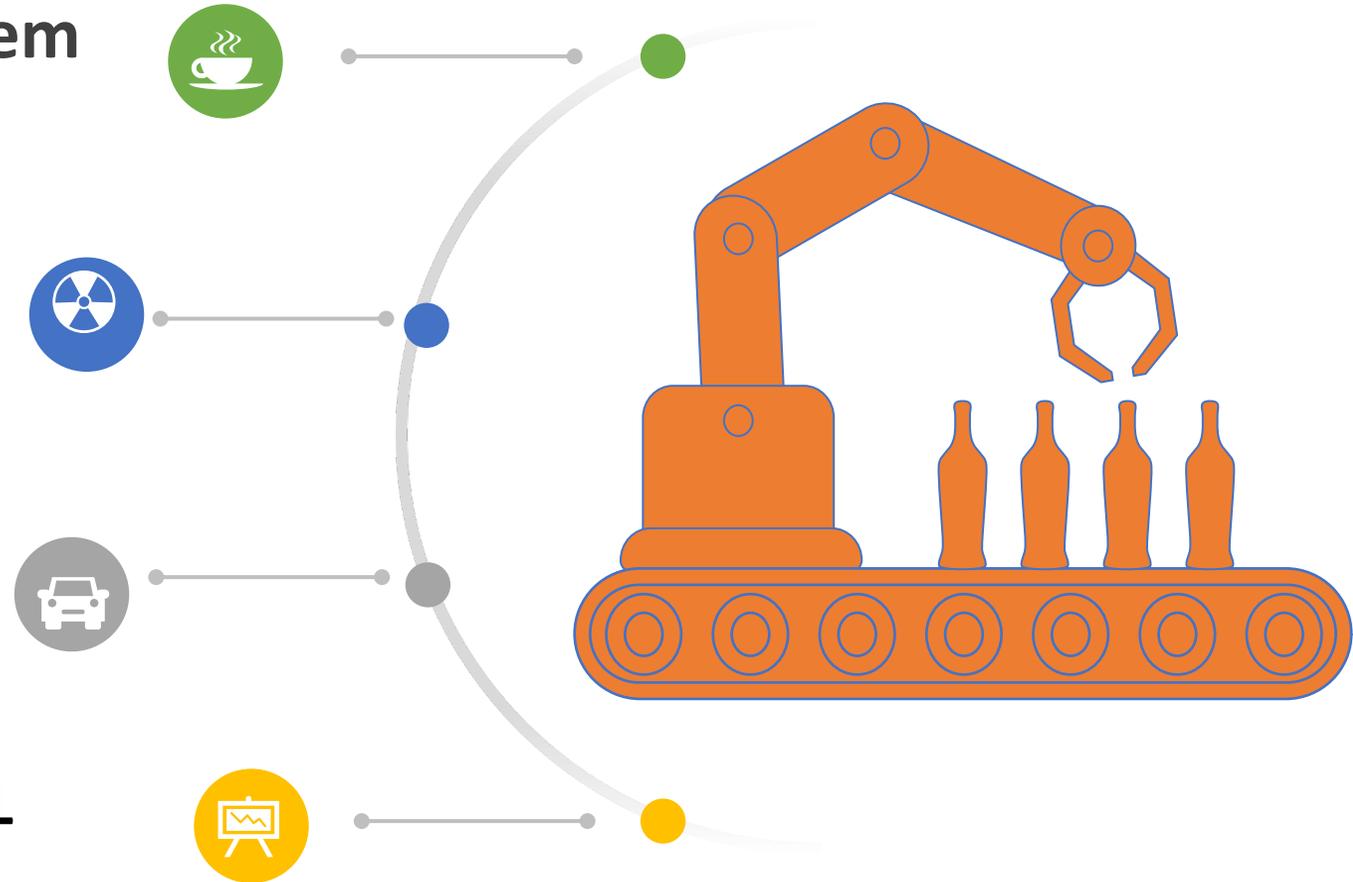
Permasalahan Eksternal

Belum tersedianya ekosistem kelembagaan pelaksanaan eksekusi

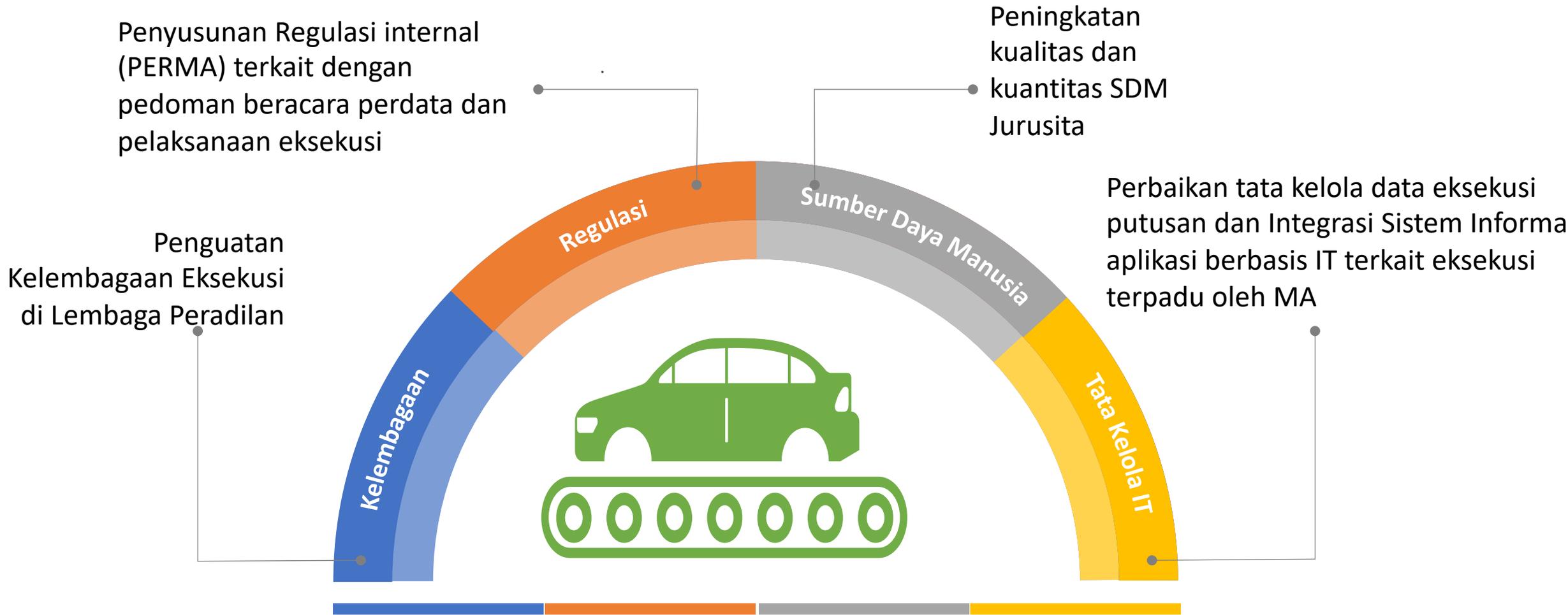
Kurangnya Koordinasi Keamanan

Kurangnya Dukungan Data/Informasi

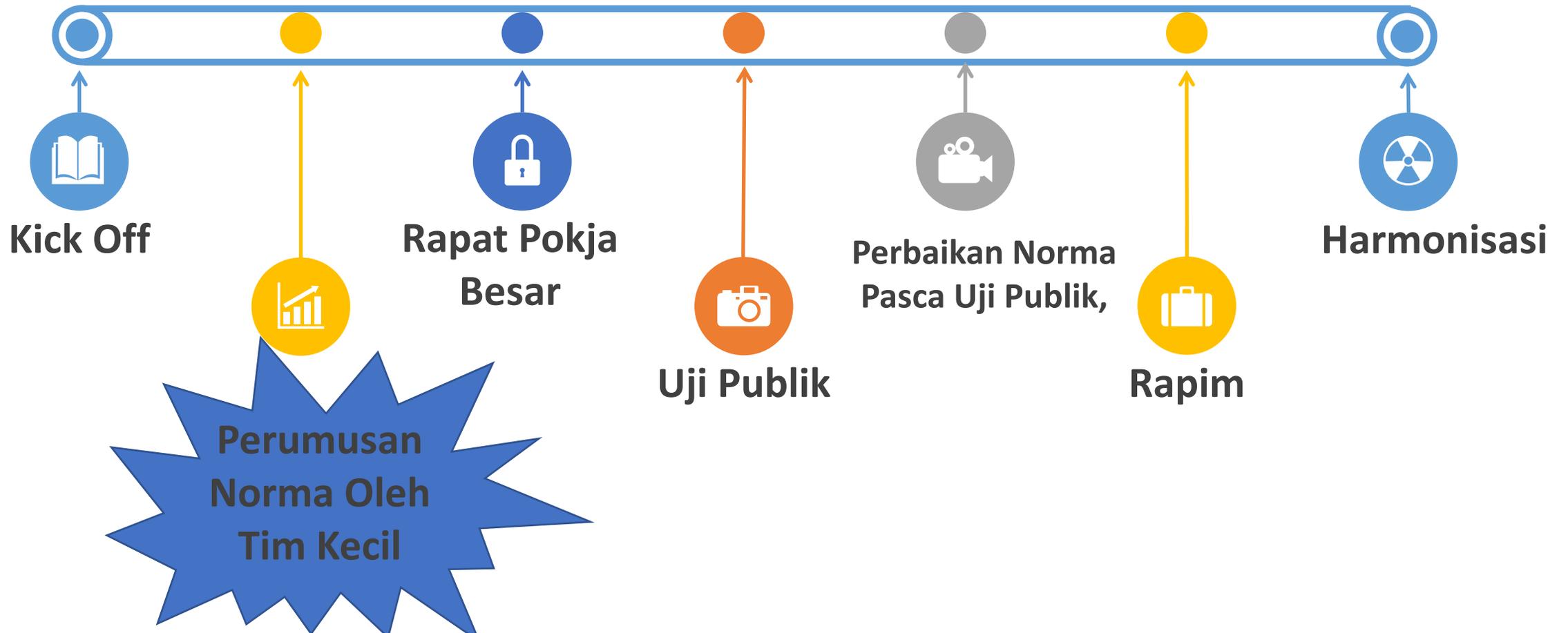
Kurangnya Koordinasi antar K/L dalam menjalankan Eksekusi



Pemetaan Langkah Mahkamah Agung



Timeline Rancangan Perma



Kebutuhan Dukungan

Dukungan Perundang-Undangan

1. Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata
2. Peraturan Teknis terkait Eksekusi
3. Peraturan Terkait Yang mendukung Terlaksananya eksekusi dengan baikl

Dukungan Keamanan

Penguatan dukungan aparat keamanan dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan

Dukungan Data dan Informasi

1. Pengembangan database perkara perdata yang terkoneksi
2. Pengembangan sistem informasi layanan keperdataan (Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak dan Kepailitan)

Dukungan dalam Pelaksanaan Eksekusi

Dukungan pelaksanaan eksekusi dari K/L terkait lainnya)





**Hambatan dan Solusi
Eksekusi Putusan
Perkara Cerai
Terkait Nafkah Istri
dan Anak**

Kompleksitas Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Cerai Terkait Nafkah Istri dan Anak



Pra Permohonan Perkara Cerai

- Minim Informasi dan Pendampingan oleh Kuasa Hukum
- Materi gugatan hanya sebatas perceraian semata, tidak memuat akibat perceraian termasuk hak asuh dan nafkah anak
- Inferior Posisi Perempuan dalam kultur masyarakat

Penanganan Perkara cerai

- Kompetensi Hakim dalam mediasi
- Putusan Perceraian sering tidak tegas mencatumkan hak pemeliharaan anak
- Belum didukung pedoman dalam menentukan nafkah anak
- Belum ada mekanisme pendampingan anak

Eksekusi Perkara Cerai terkait Nafkah Istri dan Anak

- Kekosongan hukum dalam hal perlindungan nafkah bagi istri dan anak pasca putusan cerai, khususnya untuk yang bekerja di sektor swasta/informal atau pengangguran
- Proses eksekusi seringkali menuntut biaya tinggi dan tidak sepadan dengan nominal putusan yang hendak di eksekusi
- Pihak yang kalah (baik Ayah/Ibu) tidak menyerahkan anak
- Ayah sebagai pihak yang diwajibkan memenuhi nafkah anak, mangkir dari kewajibannya
- Persoalan dalam skema tunjangan pemeliharaan anak atau bantuan khusus pasca perceraian
- Belum ada lembaga yang khusus mengurus pemeliharaan anak atau eksekusi pasca perceraian

Strategi Solusi Eksekusi Putusan Perkara Cerai Terkait Nafkah Istri dan Anak

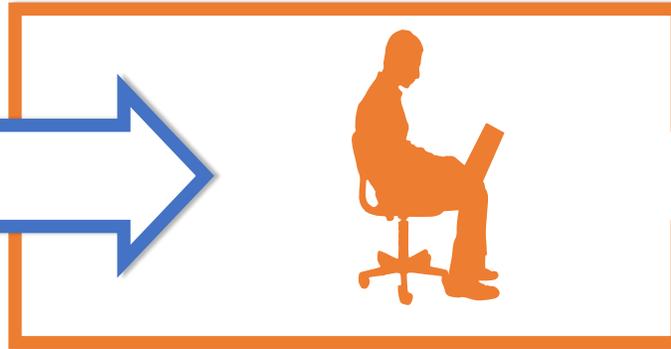
Pra Permohonan Perkara Cerai



Memperkuat kebijakan/pedoman/regulasi terkait dengan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak dalam perkara perceraian

1. Format standar gugatan perkara cerai
2. Edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan
3. Peningkatan layanan posyankum
4. Pemberian edukasi kepada OBH maupun advokat

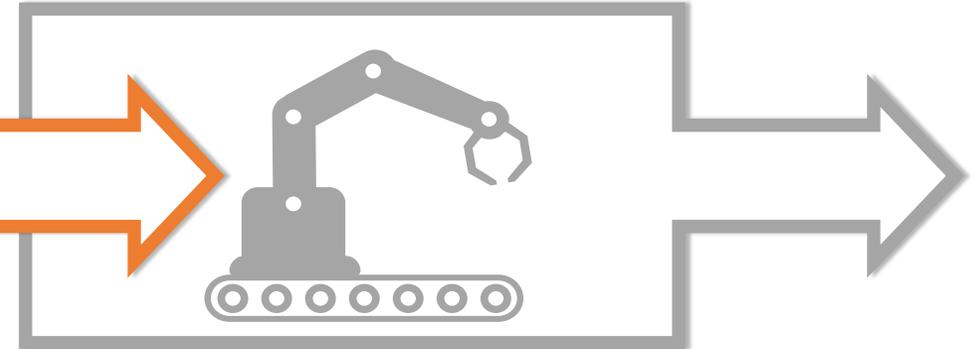
Penanganan Perkara cerai



Meningkatkan kualitas penanganan perkara cerai yang berperspektif pada pemenuhan hak bagi perempuan dan anak

1. Penguatan kompetensi mediasi hakim
2. Penyusunan pedoman/buku saku penanganan perkara cerai
3. Penyusunan PERMA tentang penghitungan standar biaya hidup
4. Penyusunan RUU Perubahan UU Perkawinan
5. Adanya mekanisme pendampingan bagi anak dari peksos dan UPTD PPA

Eksekusi Perkara Cerai terkait Nafkah Istri dan Anak



Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan cerai melalui pelaksanaan eksekusi putusan yang efektif

1. Sinergi K/L
 - untuk koneksitas sistem dan data dalam upaya eksekusi nafkah
 - Penyusunan SOP dan prosedur pemotongan yang seragam di instansi pemerintah
 - Mekanisme pengawasan pelaksanaan eksekusi nafkah
2. RPP/Rperpres tentang pemenuhan hak dan nafkah anak
3. Pembentukan lembaga pemenuhan hak anak dan mantan istri pasca perceraian

Interkoneksi Sistem Antar K/L Eksekusi Putusan Perkara Cerai Terkait Nafkah Istri dan Anak

Kementerian Dalam Negeri

memblokir Nomor Induk Kependudukan (NIK) mantan suami

Kementerian Hukum dan HAM

memblokir data paspor mantan suami

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

pemblokiran rekening mantan suami



Kepolisian

pemblokiran pengurusan SKCK

BPJS

BPJS dan layanan administrasi tingkat desa juga dapat melakukan pemblokiran akses

K/L tempat suami bekerja

pemotongan gaji



**THE EXECUTION OF THE
LAWS IS MORE
IMPORTANT THAN THE
MAKING OF THEM**

THOMAS JEFFERSON

PICTUREQUOTES.COM